PERSEPSI WARGA TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN DINOYO DAN JALAN GUNUNGSARI SURABAYA

Skripsi :

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

dalam Ilmu Filsafat Politik Islam

Oleh:

Alif Zulkifli Ramadhan

NIM : E84212071

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alif Zulkifli Ramadhan

NIM : E84212071

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2019

Alif Zulkifli Ramadhan

E84212071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Alif Zulkifli Ramadhan ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Januari 2019

Pembimbing

Dr. H. Ainur Rofiq Al-Amin, M.Ag

NIP. 19720625200511007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Alif Zulkifli Ramadhan ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag.
NIP. 197206252005011007

Sekretaris,

Zaky Ismail M.S.I.
NIP. 198212302011011007

Penguji I,

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si
NIP. 196811291996031003

Penguji II,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIF ZULKIFLI RAMADHAN
NIM : E84212071
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN / POLITIK ISLAM
E-mail address : dhanzr008@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERSEPSI WARGA TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN DINOYO DAN JALAN GUNUNG SARI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 - 3 - 2019

Penulis

(ALIF ZULKIFLI R.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti persepsi warga tentang perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari Surabaya. Yang dalam realitas perealisasinya sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Munculnya perubahan nama jalan yang digagas oleh Pemprov Jawa Timur bertujuan untuk merekonsiliasi budaya antara budaya Jawa Timur dan budaya Jawa Barat pasca Perang Bubat.

Fokus pada penelitian ini adalah apa dasar dan alasan Pemkot Surabaya merubah Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari? dan apa respon masyarakat pada perubahan Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari?. Dimaksud agar peneliti mengetahui dasar dan alasan Pemkot Surabaya serta respon masyarakat Dinoyo dan Gunungsari tentang kebijakan perubahan nama jalan.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yakni pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif yaitu salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena yang di amati di lapangan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunugsari sampai saat ini sulit untuk terealisasi. Pasalnya, Ketua Pansus Fathkul Muid mengundurkan diri dari jabatan ketuanya karena banyak tekanan dari dalam dan dari luar. Kemudian kebijakan perubahan nama jalan Dinoyo dan Gunungsari mendapat penolakan oleh masyarakat khususnya warga yang terkena imbas perubahan nama jalan dan berbagai kalangan pemerhati Surabaya diantaranya ada Paguyupan Mastrib Jawa Timur, Gerakan Peduli Rakyat Suroboyo (GPRS), Komunitas Bambu Runcing Surabaya, Komunitas Love Suroboyo dan komunitas-komunitas lainnya. Lalu ada mantan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) juga ikut menolak adanya perubahan nama jalan tersebut. Dan di lapangan sendiri Pemprov Jawa Timur belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pergantian nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari.

Keyword: Perubahan Nama Jalan, Dinoyo, Gunungsari, Pemprov Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

ABSTRAK vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Telaah Pustaka 8
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Kebijakan Publik 14
   1. Definisi Kebijakan Publik 14
   2. Unsur-unsur Kebijakan Publik 15
   3. Ciri-ciri Kebijakan Publik 18
   4. Proses Kebijakan Publik 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Komunikasi Politik 25
1. Definisi Komunikasi Politik ……..... 25
2. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik 28
C. Teori Sistem David Easton 32
D. Teori Sistem Gabriel Almond 36

BAB III SETTING LOKASI PENELITIAN

A. Kota Surabaya 38
B. Sejarah Dinoyo dan Gunung Sari 39
C. Akar Sejarah Perubahan Nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunung Sari dan Kontroversinya 40

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Perubahan Nama Jalan Potret Tidak Bekerjanya Teori Politik Gabriel Almond 48
B. Kebijakan Perubahan Nama Jalan Minimnya Komunikasi Politik Pemprov Jatim 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik sebagaimana penuturan David Easton dalam buku Endang Soetari merupakan bentuk pengalokasian nilai di masyarakat.[1] Thomas Dye mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.[2] Sedangkan dalam teori sistem menurut Gabriel Almond kebijakan publik dipandang sebagai hasil akhir dari proses politik dan Black Box (Legislatif) berperan sebagai aktor utama perumus kebijakan publik. Dalam teori sistem sebuah hasil akhir dari sebuah proses politik dimulai dari *input* yang berupa aspirasi, usulan dan persoalan yang ada di ranah akar rumput atau masyarakat. Lalu kemudian aspirasi ini masuk ke dalam kotak hitam *(Black Box)*, dalam hal ini badan legislatif di sebuah negara. Kemudian terjadi sebuah proses pembahasan di dalamnya, yang kemudian hasil akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan publik.[3]

Pada tanggal 6 Maret 2018 lalu Gubernur Jatim Sukarwo, bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X telah meresmikan dua perubahan nama jalan di Surabaya, sebagai bentuk kebijakan bersama ketiga pemprov tersebut. Dua jalan tersebut adalah Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari yang dirubah namanya menjadi Jalan

---

[1]Endang Soetari, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.
[2]Ibid
[3]Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016), hlm. 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sundan dan Jalan Prabu Siliwangi. Pergantian nama jalan di Surabaya ini merupakan bagian dari rekonsiliasi budaya antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Pergantian nama jalan ini sekaligus juga menandai berakhirnya 661 tahun konflik antar etnis Sunda dengan etnis Jawa, pasca tragedi Perang Bubat pada tahun 1357 M.[4]

Rekonsiliasi budaya pun dimulai oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 2017.[5] Ada enam jalan di DI Yogyakarta resmi menyandang nama baru. Keenam nama jalan tersebut diresmikan oleh 3 pemerintah sekaligus yakni DIY, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Nama-nama yang dipakai adalah Jalan Majapahit, Padjajaran, Siliwangi, Brawijaya, Ahmad Yani dan Prof Dr Wirjono Prodjodikoro. Pergantian nama ini melalui Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 166/KEP/2017 tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Yogyakarta.[6]

Sedangkan di Kota Bandung memiliki tiga nama jalan baru yang diresmikan melalui acara Harmonisasi Budaya Jawa Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat di depan Gedung Sate. Ketiga nama jalan tersebut adalah Jalan Majapahit yang menggantikan Jalan Gasibu, Jalan Hayam Wuruk menggantikan nama Jalan Cimandiri, dan Jalan Citraresmi yang merupakan nama belakang Dyah Pitaloka, menggantikan nama Jalan Pusdai.

---

[4]https://news.detik.com/jawatimur/3908373/nama-jalan-di-surabaya-diubah-warga-ngurus-dokumen-jangan-susah diakses 08 April 2018

[5]https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/12/p8lll5330-ini-tiga-nama-jalan-jawa-di-bandung-sebagai-rekonsiliasi diakses 2 Februari 2019

[6]https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3668400/nama-baru-6-jalan-di-yogya-ada-jalan-padjajaran-sampai-brawijaya diakses 2 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Peresmian ketiga jalan ini adalah akhir rangkaian rekonsiliasi budaya Jawa dan Sunda melalui pertukaran nama jalan di DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.[7]

Perang Pasundan Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke 14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari kerajaan Sunda di Pesanggrahan, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda.[8]

Perubahan nama jalan ini merupakan wujud rekonsiliasi antara etnis Jawa dan etnis Sunda yang telah lama berkonflik. Jalan Prabu Siliwangi menggantikan Jalan Gunungsari sedangkan nama Jalan Sunda menggantikan Jalan Dinoyo. Pergantian nama jalan tersebut menjadikan Jalan Prabu Siliwangi berdampingan dengan Jalan Gajah Mada. Sedangkan Jalan Sunda berdampingan dengan Jalan Majapahit.

Terlepas kebijakan ini adalah untuk rekonsiliasi antara etnis Jawa dan etnis Sunda yang telah lama berkonflik. Kebijakan ini tentunya juga akan menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat yang tinggal di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo. Dalam arti ada dampak persoalan administrasi baru bagi warga yang tinggal di kedua jalan tersebut. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik sebagaimana yang dipaparkan oleh Gabriel Almond, sebuah kebijakan selain menghasilkan nilai baru. Sebuah kebijakan dapat memunculkan feedback kepada pemangku kebijakan akibat lahirnya persoalan baru.

---

[7]https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/12/p8lll5330-ini-tiga-nama-jalan-jawa-di-bandung-sebagai-rekonsiliasi diakses 2 Februari 2019

[8]https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bubat diakses 09 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks peruabahan nama jalan ini selain banyak warga terdampak yang tidak setuju, karena persoalan administrasi yang mereka dapatkan pasca kebijakan ini lahir. Banyak komunitas yang menyatakan ketidaksetujuannya atas lahirnya kebijakan ini. Dari kalangan komunitas juga tidak setuju dan menolak atas perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari diantaranya ada Paguyupan Mastrib Jawa Timur, Gerakan Peduli Rakyat Suroboyo (GPRS), Komunitas Bambu Runcing Surabaya, Komunitas Love Suroboyo dan komunitas-komunitas lainnya.

Sebagaimana penuturan Sandy selaku ketua komunitas Love Surabaya, sebuah komunitas yang bergerak dibidang eksplorasi sejarah kota Surabaya. Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo adalah dua jalan yang mempunyai nilai historical yang sangat tinggi bagi Kota Surabaya. Sebagai contoh Dinoyo sampai Keputran sejak tahun 1920an sudah diplot sebagai tempat-tempat bersejarah di Surabaya. Karena di Jalan Dinoyo adalah kampung keraton Surabaya, di masa lalu Surabaya masuk dalam Kadipaten Surabaya di bawah pemerintahan Kesultanan Mataram Islam. Dan jalan dinoyo di masa lalu adalah kampung keratonnya Surabaya. Di sana juga terdapat makam Mbah Joyo Prawito yang diyakini masyarakat setempat sebagai sesepuh Dinoyo sejak zaman Belanda.[9]

Kemudian mantan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) juga ikut menolak adanya perubahan nama jalan tersebut. Salah seorang mantan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) mengatakan, “Sebetulnya kita ini adalah

[9]Wawancara dengan Sandy selaku ketua Komunitas Love Surabaya sebuah komunitas yang bergerak di bidang eksplorasi sejarah kota Surabaya. Tanggal 16 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerus perjuangan para pahlawan. Tapi atas adanya perubahan nama jalan ini cukup memalukan".[10]

Terlebih lagi Ketua Pansus perubahan nama jalan ini mengecam akan menolak perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari jika pemerintah provinsi dan kota belum memberikan jaminan kemudahan atas perubahan alamat dalam administrasi kependudukan warga setempat.

"Saya sebagai ketua pansus, berpandangan bahwa sepanjang pemerintahan belum bisa memberikan jaminan kemudahan atas perubahan alamat di kartu keluarga, kartu tanpa penduduk dan lainnya, maka perubahan nama jalan tidak perlu ada," kata Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan DPRD Kota Surabaya Fatkhul Muid.

Hal ini ditegaskan Sudarsono selaku Ketua DPD Nasdem Surabaya menyusul Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan DPRD Surabaya Fatkhul Muid lebih condong memperhatikan aspirasi warga yang menolak perubahan nama jalan, dari pada kepentingan nasional berupa rekonsiliasi budaya.

Menurut Sudarsono, pihaknya tidak mempermasalahkan kalau dengan pergantian dua nama jalan itu tidak berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat disekitarnya terutama terkait hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan kependudukan dan lainnya.

"Apalagi saya liat perubahan jalan itu tidak total hanya sebagian kecil saja (pendek)," katanya.

[10]https://jatim.antaranews.com/berita/261116/ratusan-warga-surabaya-tolak-perubahan-dua-nama-jalan-video diakses 2 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pihaknya sudah pernah menerima dokumen pertemuan masyarakat terkait adanya perubahan dua nama jalan tersebut. “Dari situ saya menyimpulkannya tidak ada masalah yang serius,” ujarnya.[11]

Dikarenakan perubahan nama jalan ini tentunya akan merubah pula alamat catatan sipil warga Surabaya khususnya warga di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo.

“Persoalan selanjutnya mas jika perubahan nama jalan ini jadi apa pemprov maupun pemkot mau mengurusi administrasi kita. Kalau pun itu gratis apa itu benar terwujud nantinya. Saya sama sekali tidak yakinbisa gratis nantinya.” ujar Sunarto selaku warga Dinoyo[12]

Ditambah lagi mas gak ada sosialisasi sama sekali dari pemprov maupun pemkot tentang perubahan nama jalan ini. *Karuan gawe opo pemprov ganti jalan pemprov kurang penggawean* (Buat apa sebenarnya pemprov ganti jalan pemprov kurang pekerjaan saja).[13]

Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua RT 5 RW 8 Gunungsari Bapak Supriyadi mengatakan, “Saya Bersama warga terdampak akan tetap teguh untuk menolak adanya pengubahan nama jalan. Saya sampai mati pun akan menolak”.

“Bahkan, meski Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjamin berbagai kemudahan pengubahan administrasi, namun pihaknya tidak percaya. Kami tidak yakin bahwa berbagai kemudahan itu akan benar-benar ada. Kami tidak ingin dibohongi,” katanya.[14]

Oleh karena itu siapkah pemkot serta warga di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo untuk menyikapi perubahan nama jalan ini. Sehingga melihat fenomena ini peneliti tertarik untuk mengkaji apa persepsi dan respon warga di Jalan Gunungsari

---

[11]https://jatim.antaranews.com/berita/260204/nasdem-tidak-arahkan-menolak-perubahan-dua-nama-jalan-di-surabaya diakses 20 Februari 2019 jam 23:20 WIB

[12]Wawancara dengan Sunarto salah satu warga Dinoyo tanggal 5 Januari 2019

[13]Ibid

[14]https://jatim.antaranews.com/berita/260151/pakar-perubahan-dua-nama-jalan-surabaya-cederai-sejarah diakses 10 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Jalan Dinoyo untuk menyikapi perubahan nama Jalan ini. Karena sebagaimana alur pembuatan kebijakan publik, sebuah kebijakan selalu melahirkan *feedback* yang patut dievaluasi oleh para pemangku kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apa dasar dan alasan Pemkot Surabaya merubah Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari?
2. Apa respon masyarakat pada perubahan Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari?

C. Batasan Masalah

Penelitian berupaya mengkaji bagaimana persepsi serta respon warga yang tinggal di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo Surabaya, atas perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa persepsi serta respon warga yang tinggal di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo Surabaya, atas perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui Apa harapan warga yang tinggal di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo Surabaya, atas perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bentuk kajian akademis tentang kebijakan Pemprov Jatim atas perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda.
2. Sebagai sarana untuk mengetahui apa persepsi serta respon warga yang tinggal di Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo Surabaya, atas perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang membahas Perubahan nama jalan.

a. Skripsi dengan judul "Sejarah Perubahan Nama Jalan di Kota Medan 1900-1970" oleh Deni Ardian Ginting. Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universiatas NegeriSumatera Utara 2009. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana sejarah perubahan nama jalan di kota Medan rentang tahun 1900-1970.[15]

[15]Deni Ardian Ginting, *Sejarah Perubahan Nama Jalan di Kota Medan Tahun 1900-1970* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Sumatera Utara, 2009), v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skripsi dengan judul "*Policy Argumentation* dalam Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan (Studi Kasus pada Ruas Jalan Berkapasitas Tinggi di Kota Bandar Lampung) oleh Kartika Raihana Lestari. Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana kebijakan pemerintah Bandar Lampung dalam melakukan rekayasa lalu lintas di kota Bandar Lampung.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa di definisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif sendiri lahir dan berkembang baik dari tradisi (main stream) ilmu-ilmu sosial Jerman yang sarat diwarnai pemikiran ala filsafat Platonik sebagaimana yang kental tercermin pada pemikiran kant maupun hegel. Ia kental diwarnai oleh aliran filsafat idealisme, rasionalisme, humanisme, fenomenologisme, dan interpretivitisme. Dari sinilah berkembang ilmu sosial interpretivisme yang mengunggulkan pendekatan penelitian kualitatif sebagai satu-satunya cara handal dan relevan untuk bisa memahami

[16]Kartika Raihana Lestari, *Policy Argumentation* dalam Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan (Studi Kasus pada Ruas Jalan Berkapasitas Tinggi di Kota Bandar Lampung) (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena sosial (tindakan manusia). Sedangkan untuk jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena yang di amati di lapangan oleh peneliti.

Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Sedangkan jenis pendekatanya adalah jenis pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.[17] Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara lebih dalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.[18]

Tahapan yang dijalankan dalam penelitian kualitatif ini, dimulai dari pengangkatan permasalahan. Dilanjutkan dengan memunculkan pertanyaan penelitian, pengumpulan data yang relevan, melakukan analisis data, dan terakhir menjawab pertanyaan penelitian.[19]

---

[17]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2006), hlm. 45.

[18]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.76.

[19]Ibid.., hlm.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sumber dan Jenis Data**

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh, dalam hal ini dibedakan menjadi dua :

Pertama, sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan narasumber utama penelitian ini yakni tokoh masyarakat di Jalan Dinoyo dan Gunungsari. Contohnya seperti struktur birokrasi politik di lingkungan tersebut, seperti RT/RW, Lurah dan Ulama di lingkungan tersebut, ditambah para pemuda, dan tokoh perempuan yang tentu saja berstatus warga pribumi di Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari Surabaya.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu dengan mencari berbagai data tentang perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sundan.

3. **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni dengan metode wawancara dan interview kepada narasumber utama dalam penelitian ini.

4. **Metode Penentuan Informan**

Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Nonprobability Sampling. Sedangkan tekniknya adalah sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sumber data atau sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini pengambilan sampel benar-benar ditentukan oleh keahlian sampel tersebut tentang persoalan yang diteliti si peneliti. Contohnya seperti struktur birokrasi politik di lingkungan tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti RT/RW, Lurah dan Ulama di lingkungan tersebut, ditambah para pemuda, dan tokoh perempuan di lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana perspektif serta respon dari perubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sundan.[20]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi ataupun kondisi yang terjadi. Data-data yang terkumpul, akan dieksplorasi dengan analisis deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakangmasalah,yang berisikan alasan atau permasalahan yang mendasari penulisan skripsi, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang kajian pustaka dan kajian teoritik yang berkaitan Kebijakan Publik dan teori sistem serta sejarah konflik etnis Jawa dan etnis Sunda yang melatarbelakangi munculnya kebijakan perubahan nama jalan ini sebagai rekonsiliasi.

[20]Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2015), hlm. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, menegaskan beberapa deskripsi subjek penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian. Dalam bab ini peneliti juga menunjukkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berstatus warga Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo yang terdampak kebijakan perubahan nama jalan ini.

Bab keempat merupakan Analisis data yaitu tahap dimana peneliti mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam bab ini mencakup tentang temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori.

Bab kelima Merupakan bagian penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kebijakan publik. Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Endang Soetari mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau pun tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.[21]

James Anderson sebagaimana dikutip dari Endang Sotarti mendefinisikan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.[22] Sedangkan David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.[23]

Dengan berbagai pengertian kebijakan publik tersebut diatas bagaimanapun rumusnya, pada hakikatnya bahwa kebijakan publik diarahkan demi kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau sekelompok orang aktor politik harus senantiasa memasukkan

[21]Endang Soetari, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.
[22]Ibid
[23]Ibid., hlm. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya atau kemauannya semata-semata sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau pubik.

Dari beberapa definisi kebijakan publik tersebut terdapat beberapa elemen penting tentang kebijakan publik.

a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa kebijakan publik itu baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi tujuan tertentu.
d. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.[24]

2. Unsur-unsur Kebijakan Pubik

Sebagai sebuah system yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melaui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap

[24]M. Irfan Islamy, *Polytic Analiys Seri Monografi Kabijakan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2000), hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan :

Unsur Pertama, tujuan kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaannya tidak hanya sekadar pada jangka waktu pencapaian tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi dan dukungan.

Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. *Pertama*, tujuan yang diinginkan dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak. *Kedua*, mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan yang kuat dalam masyarakat. Tujuan yang rasionnal merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternative yang diperhitungkan atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Sisi lain yang berkaitan dengan kriteria rasional adalah realistis.

Tujuan itu biasanya ditetapkan setelah memperhitungkan keberadaan organisasi, peraturan yang berlaku, dan sumber daya yang dimiliki atau yang dapat dikuasai. *Ketiga*, tujuan yang baik itu masuk akal (logis) dan mempunya gambaran yang jelas. Pola pikirnya runut dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya sehingga orang dapat membedakan tercapai tidaknya tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud setelah jangka waktu tertentu. *Keempat*, tujuan dari kebijakan tersebut mempunyai orientasi ke depan.

Unsur Kedua, dalam studi kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kendala dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan jika suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat.

Unsur Ketiga, dari kebijakan adalah tuntutan. Tuntutan muncul karena salah satu dari dua sebab. *Pertama*, karena terbaiknya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. *Kedua*, karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur Keempat, dari suatu kebijakan adalah dampak. Damapak merupakan tujuan lanjutuan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.

Unsur Kelima, dari kebijakan adalah sarana atau alat kebijakan. Suatu kebiajkan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa sarana ini dapat disebutkan, antara lain kekuasaan, insentif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.[25]

Pembuatan kebijakan secara khusus mencakup suatu pola tindakan yang membutuhkan cukup banyak waktu dan meliputi banyak keputusan, baik yang rutin maupun tidak.[26]

Sedangkan pembuatan keputusan mencakup pilihan suatu alternatif dari banyak alternatif yang berbeda. Menurut Nurcholis kebijakan berissikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan.
b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.[27]

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas, dalam artian mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas.

---

[25]Hanif Nurcholis, *Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 25-32.

[26]Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)* (Yogyakarta: Medpress, 2008), hlm. 37.

[27]Erwin Zubair Gobel, Yosep P. Koton, *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

James Anderson dan kawan-kawan mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut :

a. *Setiap kebijakan harus ada tujuannya.* Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Sehingga dapat dipahami orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti.

b. *Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain.* Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan penegakan hokum. Suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan lain.

c. *Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah,* bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki atau dilakukan pemerintah. Karena kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan dari pemerintah.

d. *Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan unntuk melaksanakan dan menganjurkan.* Selain melarang dan menganjurkan, dalam masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang. Dalam pengambilan suatu keputusan, akan tetapi juga tidak menolak keputusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Kebijakan harus berdasarkan hokum*, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.[28]

Kelima ciri tersebut dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena tujuan yang ingin dicapai.

4. Proses Kebijakan Publik

a. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah *purposive* atau *goal-oriented*. Artinya suatu kebijakan dibutuhkan karena ada tujuan yang dicapai. Jika tidak ada tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan. Adanya alasan pengadaan kebijakan karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Sehingga kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada, yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Tanpa ada masalah tidak perlu ada kebijakan baru. Masalah dapat diamati melalui kondisi negatif yang tampak atau yang dapat dirasakan, masalah dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya gangguan atau hambatan dalam pencapaian tujuan. Penanganan suatu masalah dapat dilihat dari konsekuensi yang ditimbulkan atau pencapaian suatu tujuan dapat diukur dalam nilai hasil.

Dalam proses perumusan dan aplikasi kebijakan seringkali muncul sikap kontroversi dalam masyarakat. *Pertama*, sebagai akibat dari

[28]Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan kepentingan diantara kelompok. *Kedua,* karena perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara mereka terdapat kepentingan yang sama. *Ketiga,* bersumber dari perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua pihak mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut.

Perumusan masalah biasanya dilakukan sekurang-kurangnya melalui tiga tahap, yaitu pengamatan, pengelompokan dan pengkhususan masalah. Pada tahap pertama orang akan melihat atau merasakan adanya suatu keadaan atau kejadian. Melalui pengamatan dapat dipahami latar belakang keadaan atau masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah pengkhususan masalah sehingga dapat dibuat rumusan masalahnya.[29]

b. Agenda Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

Agenda kebijakan didefinikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan secara umum serta dengan istilah *prioritas* yang biasanya dimaksudkan pada susunan pokok-pokok agenda pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan agenda yang lain.[30]

Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk

[29]Ibid., hlm. 75-76.
[30]Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*…, hlm. 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditindaklanjutin oleh pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Apakah kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan, kecenderungan yang berbeda akibatnya tidak semua kepentingan tertampung dalam agenda kebijakan.

Proses penyusunan agenda kebijakan dipengaruhi oleh sistem demokrasi yang hidup dalam masyarakat dan tingkat partisipasi rakyat dalam proses kebijakan.[31] Menurut Jones agenda adalah sebuah istilah tentang pola-pola tindakan pemerintah yang spesifik sifatnya. Di sisi lain agenda pemerintah merupakan suatu wujud keseriusan para *decision maker* kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang tengah dialami atau dirasakan.

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni *Pertama*, membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bias jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain elite politik bukan dianggap suatu masalah. *Kedua*, membuat Batasan masalah dan yang *Ketiga*, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

[31]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses Perumusan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan merupakan langkah selanjutnya setelah identifikasi dan perumusan masalah. Pada taraf ini bermacam alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang oleh para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat, sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Ada dua actor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. *Pertama,* mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan, hal ini dapat dilihat dari pada kebenaran mengindetifikasi masalah secara tepat artinya masalah yang diidentifikasi tidak hanya sekedar benar dalam arti masuk akal, tetapi juga dapat ditangani dilihat pada berbagai sarana dan kondisi yang ada. *Kedua,* ada dukungan terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan, tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tidak dapat terwujud.

Jones mengemukakan bahwa dalam menghasilkan perumusan yang baik dan komprehentip ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai berikut :

1. Jumlah dari masalah yang ditangani, apakah usulan kebijakan mempunyai seluruh masalah dalam lingkup masalah atau perhatiannya hanya pada contohnya semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah atau hanya melayani aspek tertentu saja.
3. Memperhatikan dampak apakah usulan kebijakan diformulasikan sudah diuji semua dampaknya, atau penguji dibatasi pada dampak langsung dalam lingkup isu saja.[32]

d. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi berkaitan dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring, serta evaluasi sebagai langkah-langkah akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan. Berhasil atau tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh langkah tersebut, sehingga pembahasan tentang langkah implementasi tidak banyak berbeda dengan pembahasan fungsi aksi tersebut.[33] Setelah kebijakan publik telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut.[34]

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam

[32]Ismail Nawawi, *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Putra Media Nusantara ITS, 2009), hlm. 124-125.
[33]Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik..*, hlm. 145.
[34]Hanif Nurcholis, *Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah..*, hlm. 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan. Dalam melakukan evaluasi hasil agar dikaitkan dengan sumber daya yang berada dibawah kewenangannya seperti sumberdaya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja dan hal-hal yang berkaitan. Langka terkahir dalam proses suatu kebijakan. Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draf kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.

Kemudian evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi, kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi.[35] Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk mempertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

B. Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai komunikasi politik. Menurut Dahlan sebagaimana dikutip oleh Hafied Cangara ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perikalu dan kegiatan

[35]Ismail Nawawi, *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)..*, hlm. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.[36]

Dalam buku *Introduction to Political Communication* oleh McNair dinyatakan bahwa murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda.[37]

Ilmuwan komunikasi Indonesia A. Muis, menjelaskan bahhwa istilah komunikasi politik menunjukkan pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik.

Selain itu, Astrid S. Soesanto mengartikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan pada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.[38]

---

[36]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 29.
[37]Ibid., hlm. 30.
[38]Ibid., hlm. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Muller merumuskan kommunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi. Sedangkan Galnoor menyebutkan kombinasi dari beberapa interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan masuk ke dalam peredaran.

Para pakar ilmu politik, seperti Almond dan Powell justru menempatkan komunikasi politik sebagai fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekruitmen yang terdapat dalam sistem politik tertentu. Bahkan, menurut kedua pakar tersebut justru komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berkelangsungnya fungsi-fungsi yang lain.

Dari perspektif yang berbeda, Nimmo juga memberi rumusan komunikasi politik. Dengan memandang inti *komunikasi* sebagai proses interaksi sosial dan inti *politik* sebagai konflik sosial, Nimmo merumuskan komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi actual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik.[39]

Berdasarkan uraian dan pendapat para ilmuwan diatas, maka komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik. Jadi untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu

[39]Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi, terletak pada sifat atau isi pesannya.[40] Dan komunikasi politik mempunyai lingkup pembahasan yang sangat luas, tidak hanya membahas bagaimana komunikasi dapat dipergunakan dalam mencapai kekuasaan dan tujuan politik secara internal tapi juga bagaimana sistem yang berlangsung dapat dipertahankan dan dialihgenerasikan.[41]

2. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya yaitu:

a. Retorika, berasal dari bahasa yunani, yang berarti seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang siding pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan interpersonal. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak. Ada tiga jenis retorika menurut Aristoteles dalam karyanya *Retorika*, (a) retorika diliberitif yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah, yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksanakan; (b) retorika forensic, yang berkaitan dengan keputusan pengadilan; (c) retorika demonstrative, yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat.

b. Agitasi Politik, dari bahasa *Agitare* artinya bergerak atau menggerakan, dalam bahasa inggis *agitation*. Menurut Harbert Blumer agitasi beroperasi

[40]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*,.. hlm. 30.
[41]Ardial, *Komunikasi Politik*,.. hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan massa. Orang yang melakukan agitasi disebut agitator yang oleh Nepheus Smith disebut sebagai orang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan atau pemberontakan orang lain. Ada agitator yang sikapnya selalu gelisah dan agresif, ada juga yang lebih tenang, cenderung pendiam tetapi mampu menggerakan khalayak dengan ucapan dan tulisannya.

c. Propaganda, berasal dari kata latin *propagare* (menanamkan tunas suatu tanaman) yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama khatolik pada tahun 1822 Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yang bernama *Congregation de Propagandan Fide* untuk menumbuhkan keimanan kristiani diantara bangsa-bangsa. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti kepada khalayak dan menciptakan suasana yang mudah terkena sugesti, di negara demokratis menurut W. Dobb dipahami sebagai suatu usaha individu atau kelompok yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan menggunakan sugesti. Sedangkan Harbert Blumer, suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampanye politik dengan sengaja mengajak, mempengaruhi guna menerima suatu pandangan sentiment atau nilai.

d. *Public Relations* (PR) *Politics*, yang tumbuh pesat di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, sebagai suatu upaya alternative dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik, Presiden Theodore Rossevelt (1945) mendeklarasikan pemerintahan sebagai *square deals* (jujur dan terbuka) dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik secara rasional. Sehingga tujuannya untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, professional atau aktivis (komunikator) dengan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).

e. Kampanye Politik, adalah bentuk komunikasi poltik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Menurut Rogers dan Storey (1987), merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, sehingga berbeda dengan propaganda, dimana kampanye cirinya sumber yang melakukannya selalu jelas, waktu pelaksanaan terikat dan dibatasi, sifat gagasan terbuka untuk diperdebatkan khalayak, tujuannya tegas, variatif serta spesifik, modus penerimaan pesan sukarela dan persuasi, modus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakannya diatur kaidah dan kode etiknya, sifat kepentingan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

f. Lobi Politik, istilah lobi sendiri sesugguhnya tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel, karena yang hadir para politikus yang melakukan pembicaraan politik (*political lobbying*) terjadi dialog dengan tatap muka (komunikasi antarpersonal) secara informal namun penting. Karena hasil lobi biasanya ada kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau siding politik yang akan menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu. Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan charisma. Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaa, pengaruh, otoritas, konflik dan consensus.

g. Lewat Media Massa, menurut MacLuhan sebagai perluasan panca indra manusia (*the medium in the message*) dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoritas, membentuk dan merubah opini publik atau dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.[42]

[42]Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*, (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2010) hlm. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Sistem David Easton

Berbicara mengenai Teori Sistem tentu tidak bisa lepas dari nama David Easton sebagai tokoh kunci teori sistem. Easton mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam masyarakat dimana di dalamnya ada alokasi yang mengikat atau juga otoritas yang dibuat dan diimplementasikan. Ronald H. Chilcote dalam bukunya menyatakan Easton mengidentifikasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yang terdiri atas.[43]

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

   Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.

2. Input-output

   Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masukdari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas ejumlah unit

[43]Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016), hlm. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam sistem politik. *Dukungan* secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

3. Diferensiasi dalam sistem

Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan pula harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan-kepentingan partai politik, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

4. Integrasi dalam sistem

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan media massa.

Hasil pemikiran tahap pertama Easton adalah sebagai berikut:[44]

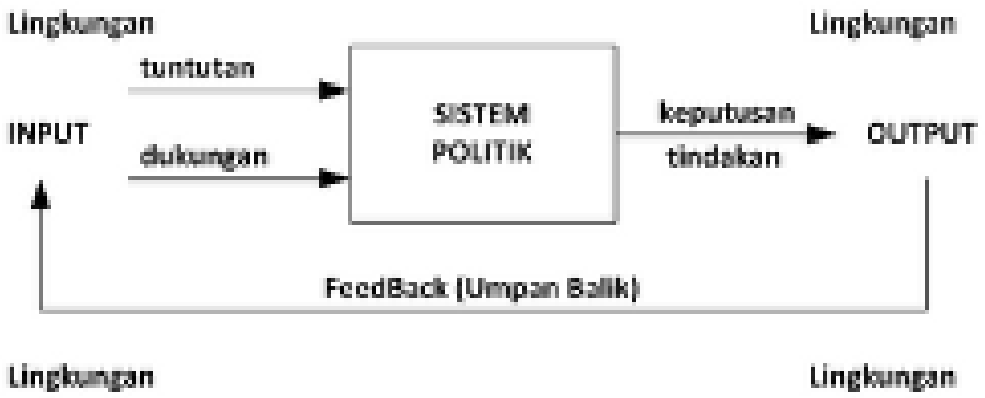

Skema Kerja Sistem Politik Easton

Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan UU, pengawasan DPR

[44]Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016), hlm. 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam *awal* kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Input adalah *pemberi makan* sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*.

Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu *positif* (*forwarding*) dan *negative* (*rejecting*) kinerja sebuah sistem politik.

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (action). *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

D. Teori Sistem Gabriel Almond

Dalam Teori Sistem menurut Gabriel Almond kebijakan publik dipandang sebagai hasil akhir dari proses politik dan Black Box (Legislatif) berperan sebagai aktor utama perumus kebijakan publik. Dalam teori sistem sebuah hasil akhir dari sebuah proses politik dimulai dari *input* yang berupa aspirasi, usulan dan persoalan yang ada di ranah akar rumput atau masyarakat. Lalu kemudian aspirasi ini masuk ke dalam kotak hitam *(Black Box)*, dalam hal ini badan legislatif di sebuah negara. Kemudian terjadi sebuah proses pembahasan di dalamnya, yang kemudian hasil akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Input ⟶ **Black Box** ⟶ **Output**

Jika sebuah Negara menggunakan Teori Sistem Gabriel Almond sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Maka ada syarat utama yang harus dipenuhi guna terlahirnya sebuah kebijakan yang dapat sesuai harapan, yaitu baiknya kemampuan Legislasi dari Black Box atau Badan Legislatif sebuah Negara. Gabriel Almond adalah seorang positivistik yang menganggap aktor politik bisa bebas nilai dan bebas dari kepentingan, padahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika melihat apa yang terjadi di Indonesia kenyataannya tidak demikian karena aktor politik kita tidak bebas dari kepentingannya masing-masing.

Maka jika sebuah Negara menggunakan teori sistem Gabriel Almond dalam proses perumusan kebijakannya, maka aktor politik yang punya peran besar dalam perumusan kebijakan publik tersebut haruslah orang yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan selanjutnya dari mana sebuah negara bisa mempunyai aktor politik yang duduk di Badan Legislatif yang mempunyai kecakapan dalam menjalankan tugasnya. Jawabannya adalah dari sebuah proses kompetisi demokrasi (pemilu) yang demokratis. Dan syarat utama berjalannya sebuah pemilu yang demokratis adalah ketika masyarakatnya mempunyai kedewasaan dalam berpolitik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING LOKASI PENELITIAN

A. Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Tmur, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta dan 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa.

Surabaya secara geografis berada pada 07º09`00´ - 07º21`00´Lintang Selatan dan 112º36` - 112º54` Bujur Timur serta memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 2.917.688 jiwa di tahun 2018. Daerah metropolitan Surabaya bernama Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Surabaya terkenal dengan sebutan *Kota Pahlawan* karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan *Arek-arek Suroboyo* (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya.[45]

[45]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses 28 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Dinoyo dan Gunung Sari

Kampung Dinoyo yang terletak di belahan pusat kota Surabaya merupakan salah satu kampung tua di Surabaya. Sebagai kampung tua sejak zaman kolonial Belanda tahun 1920 kampung Dinoyo hingga kini masih bukti sejarah bahwa kampung ini merupakan kampung lama yang berdekatan dengan kawasan elit di jalan raya Darmo. Kampung Dinoyo berdekatan dengan Keputran yang dulu merupakan tempat tinggal puteri-puteri kerajaan/kraton "Keputren". Beberapa situs di kampung Dinoyo masih ada hingga sekarang, seperti makam Mbah Djojo Prawiro (sesepuh Dinoyo), Balai Rakyat hingga Ponten zaman Belanda.

Kampung Dinoyo terbagi menjadi 2 kawasan yakni Dinoyo barat dan Dinoyo Timur (di stren kalimas), Dinoyo sebelah Barat meliputi Jalan Dinoyo, Dinoyo Gang I-IX, Dinoyo Tangsi, Dinoyo Alun-Alun, Dinoyo Sekolahan, Dinoyo Batu, Dinoyo tengah, Dinoyo ponten, Dinoyo Pasar, Dinoyo Buntu, Dinoyo langgar, Dinoyo Lor, serta Dinoyo gang Makam, sedangkan Dinoyo timur meliputi Dinoyo Tenun, Dinoyo Tambangan dan Dinoyo Magersari.[46]

Adapun kampung Tua memang layak di pandang oleh kampung Gunung Sari, yang keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Surabaya.

Area Gunungsari merupakan lahan perbukitan atau gunung kecil yang berada di sayap utara Sungai Surabaya (anak Sungai Brantas), Di kawasan inilah (sungai Surabaya) dulu digunakan sebagai pelabuhan sejak zaman Majapahit.

---

[46]http://www.lovesuroboyo.org/dinoyo-kampung-tua-bersejarah-di-surabaya/ diakses 28 Agustus 2018 jam 17:34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konon nama Gunung Sari itu sendiri diyakini karena para nahkoda yang menyusur sungai Brantas di zaman dulu, ketika sampai di kawasan Gunung Sari hingga pelabuhan Dadoengan (kini kawasan Wonokromo) selalu berteriak "Sari, Sari, Sari….!" yang artinya memberi aba-aba agar kapal atau perahu berjalan pelan-pelan, karena sudah terlihat gunung kecil atau bukit dengan ketinggian 20-30 meter dari permukaan laut.

Di Gunung Sari terdapat salah satu lapangan Golf tertua di Indonesia sejak 1898 yang bernama Lapangan Golf Bukit Gunungsari lalu berganti nama Golf Ahmad Yani, dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Di Zaman Perjuangan, kawasan Gunung Sari dijadikan sebagai benteng pertahanan terakhir dan pengungsian Laskar Arek-Arek Suroboyo saat menghadapi tank-tank sekutu Inggris yang mulai masuk dari Wonokromo ke Gunung Sari saat pertempuran 10 November 1945, dan di Gunung Sari ini juga akhir dari pertempuan 10 November 1945 yang berlangsung selama 3 minggu (pertempuran berakhir pada puncaknya 28 November 1945) di Gunung Sari.[47]

C. Akar Sejarah Perubahan Nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunung Sari dan Kontroversinya

Cinta berbalas tuba. Rombongan Kerajaan Sunda yang hendak mengawinkan putri mahkota, Dyah Pitaloka Citraresmi dengan Hayam Wuruk Raja Majapahit, justru dihabisi di lapangan Bubat. Soalnya satu dan menonjok

[47]http://www.lovesuroboyo.org/gunung-sari-diduga-ada-sejak-zaman-majapahit/ diakses 11 Oktober 2018 jam 01:49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan: Kerajaan Sunda dianggap takluk dan putri sebagai upeti. Kafilah yang hendak kawin itu tak punya pilihan, selain melawan sampai binasa.

Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, beserta para pengawalnya tewas berkalang tanah. Sementara Dyah Pitaloka Citraresmi memilih bela pati dengan menghunjamkan *patrem* atau tusuk konde ke jantungnya. Ia pun tumpas. Akhirnya, tempat kediaman orang-orang Sunda dikepung dan diserbu oleh tentara Majapahit. Terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua orang Sunda gugur, tak ada yang ketinggalan.[48]

Orang Sunda muntab, terutama kepada Gadjah Mada sebagai tokoh kunci pembantaian tersebut yang mengedepankan ambisinya memenuhi Sumpah Palapa, yaitu menaklukkan seluruh Nusantara. Bernard H.M. Vlekke menulis sebagaimana dikutip dari Muhammad Muhabbudin.

> "Lalu si hulubalang, dengan dingin dan menghina, menghancurkan segala harapan mereka. Dari awal dia sudah menentang perkawinan itu, yang dia anggap merendahkan martabat tuannya. Dia menunjukkan pada orang-orang Sunda itu bahwa dia hanya akan membiarkan mereka mempersembahkan sang putri kepada harem istana sebagai upeti dari seorang raja bawahan kepada raja junjungannya,".[49]

Narasi pengkhiatan ini selama ratusan tahun diproduksi lewat cerita lisan, buku, dan sebagainya. Waktu berlalu, masa berganti, dan negara bernama Indonesia pun telah berdiri, kiranya kebencian tak sepenuhnya luruh. Proses menjadi Indonesia belum sepenuhnya selesai.

Peristiwa Perang Bubat mula-mula dikabarkan oleh tiga naskah, yaitu *Pararaton, Kidung Sundayana,* dan *Carita Parahyangan.*

---

[48]Muhammad Muhibbudin, *Sejarah Kelam Jawa dan Sunda Cinta Perang dan Rekonsiliasi*, (Yogyakarta: Araska, 2018), hlm. 135.

[49]Ibid 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Slamet Muljanan sebagaimana penulis kutip dari Muhammad Muhibbudin menerangkan hal serupa, yakni penyulut peperangan tak seimbang itu adalah Gadjah Mada.[50]

"Pati Madu yang diutus mengantarkan surat lamaran kepada Maharaja Pasunda sudah pulang dengan hasil baik. Namun, ketika sang rajaputri diantar ke pura Majapahit, patih Gadjah Mada menganut kehendaknya sendiri, mengajukan syarat. Akibatnya, terjadi peperangan antara orang Sunda dan orang Majapahit," tulisnya.

Karena peristiwa Perang Bubat tersebut, sampai tanggal 11 Mei 2018, Jawa Barat tak punya ruas jalan yang bernama Majapahit, Hayam Wuruk, apalagi Gadjah Mada. Oleh sebagian masyarakat, nama kerajaan, nama raja serta patih itu dianggap sebagai *pamali* jika disematkan menjadi nama jalan di Tatar Sunda.

Dalam berbagai naskah, Perang Bubat dikabarkan terjadi pada tahun 1357 Masehi.[51] 661 tahun pasca-kejadian tersebut, Jawa Barat baru memiliki Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan nama dua jalan tersebut pada acara bertajuk Harmoni Budaya Jawa-Sunda 2018 yang digelar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat 11 Mei 2018.

"Putri Raja memakai mahkota, kilaunya menawan mata, Harmoni Budaya Jawa-Sunda bukti kebhinekaan Indonesia," kata Aher mengawali acara tersebut.

---

[50]Ibid 140
[51]Ibid 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa penamaan jalan di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dengan nama kerajaan dan rajanya tersebut adalah cara budaya membersihkan kotoran-kotoran.

"Penyelesaian budaya menjadi yang paling baik karena bisa menghaluskan yang kasar dan menjernihkan yang kotor," ujarnya.[52]

Ruas-ruas jalan yang namanya diganti terletak tak jauh dari Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jalan Majapahit terletak di sebelah barat Lapangan Gasibu. Sementara itu, Jalan Hayam Wuruk menggantikan Jalan Cimandiri yang letaknya di sebelah barat Gedung Sate.

Namun, alih-alih mengganti nama jalan lain dengan Jalan Gadjah Mada selaku tokoh utama dalam peristiwa Perang Bubat, pada acara itu justru diresmikan pula Jalan Citraresmi yang sebelumnya bernama Jalan Pusdai.

Pergantian nama ruas jalan seperti yang dilakukan di Kota Bandung awalnya di Yogyakarta. 3 Oktober 2017, Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan nama Jalan Padjadjaran, Jalan Siliwangi, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya, dan Jalan Prof. Dr. Wirjono Projodikoro. Nama-nama tersebut menghiasi ruas jalan arteri (ringroad).

Langkah Sultan ini sempat mengundang sejumlah pertanyaan dari beberapa pihak karena secara konteks sejarah, Kerajaan Mataram Islam dengan Kerajaan Sunda berbeda periode. Meski Mataram Islam pada beberapa periode berikutnya

[52]https://tirto.id/pergantian-nama-jalan-661-tahun-setelah-perang-bubat-cKnd diakses 17 Oktober 2018 jam 01:27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat berkuasa di Tatar Sunda, khususnya Priangan, tapi hegemoni kekuasaan selama dua abad itu barangkali tak melahirkan kebencian separah terhadap tragedi Perang Bubat.

Sultan melihat pergantian nama jalan tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi kultural antara Jawa dan Sunda, dan lebih luas lagi Indonesia, terlepas dari kerajaan mana yang bertikai.

"Kami menyadari pemimpin kerajaan terdahulu saling mengalahkan satu sama lain, tapi kemudian bersatu dalam NKRI. Kejayaan Majapahit, Sriwijaya 700 tahun lalu sudah waktunya dibangkitkan di abad 21 ini, dan rekonsiliasi bagi saya merupakan hal penting untuk menatap masa depan," kata Sultan.

Sementara di Surabaya, pergantian nama jalan terkait peristiwa Perang Bubat sempat diprotes oleh warga Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari. Kedua nama jalan tersebut akan diganti oleh Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi.

Rabu, 7 Maret 2018, sejumlah warga turun ke jalan dan sebagai bentuk protes mereka membawa secarik kertas bertuliskan "Jl. Soekarwo" serta berfoto di bawah tulisan "Jl. Dinoyo". Bagi mereka, yang jadi masalah bukan pergantian dengan nama yang berbau Sunda, tapi Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari memiliki sejarah panjang yang mereka banggakan.

"Coba tanyakan kepada para sesepuh warga Dinoyo, jalan tersebut sejak dulu sudah bernama Dinoyo. Coba kalau nama kita diganti begitu saja, jelas kita marah. Karena sudah ratusan tahun jalan ini sudah ada. Menjadi kebanggaan sendiri bagi mereka," ujar Kusnan, pemerhati sejarah dan budaya dari Paguyuban Arek Suroboyo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, beberapa minggu setelah aksi penolakan tersebut, muncul spanduk tandingan yang menyatakan dukungan terhadap pergantian nama jalan tersebut. Warga yang mendukung menuding bahwa warga yang menolak kemungkinan ditunggangi pihak lain.

Surjo Hadi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPKM) Keputran mengklaim bahwa seluruh warga Dinoyo mendukung pergantian nama jalan itu. Ia pun meyakinkan bahwa kekhawatiran warga terkait pengurusan surat-surat yang sifatnya administratif tidak akan sulit.

Menanggapi rencana perubahan nama jalan ini, Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan bahwa selain harus melalui persetujuan DPRD Surabaya, perubahan nama jalan juga harus memiliki latar belakang sejarah sejarah dan sosiologi seperti penamaan yang selama ini telah dilakukan.[53]

Ia menilai perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari dengan nama jalan lain yang dikaitkan dengan peristiwa Perang Bubat kurang kuat secara sejarah dan sosiologis.

"Kalau alasannya itu, ya di-*guyu* generasi milenial. Wong Bonek sama Bobotoh dan Viking saja akur, kok bawa-bawa perang yang lama banget? Hubungan Pemprov Jatim dengan Jabar kan juga sangat baik," ujarnya.

Pendapat serupa dilontarkan oleh pemerhati sejarah Kuncarsono Prasetyo. Menurutnya, penamaan jalan lahir dari kesepakatan bersama dan ada sejarah yang

[53]https://tirto.id/pergantian-nama-jalan-661-tahun-setelah-perang-bubat-cKnd diakses 17 Oktober 2018 jam 01:20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyertainya. Ia menambahkan bahwa beberapa nama jalan yang mempunyai akar lokal yang kuat, sejak zaman Belanda tidak pernah diganti, seperti Jalan Tunjungan, Gemblongan, Bubutan, dan sebagainya.

Persoalan di Surabaya memang berbeda dengan yang terjadi di Bandung dan Yogyakarta. Secara sejarah, *ringroad* (Yogyakarta), Jalan Gasibu, dan Jalan Pusdai relatif kurang memiliki akar kelokalan yang kuat. Kalau pun ada yang agak berat diganti yaitu Jalan Cimandiri, karena jalan tersebut telah ada sejak lama dan dikelompokkan dalam satu wilayah yang nama-nama jalannya adalah nama sungai di Jawa Barat.[54]

Sebenarnya agenda Rekonsiliasi Budaya yang digagas Gubernur Jawa Timur merupakan sebuah karya kebudayaan yang adiluhung. Ditengah-tengah kegersangan gerakan kebudayaan, upaya ini patut diapresiasi luarbiasa. Upaya rekonsiliasi Budaya Sunda dengan Budaya Jawa yang digagas tersebut merupakan langkah-langkah brillian untuk semakin mendekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Utamanya ditengah-tengah silang-sengkarut politik yang sangat gaduh akhir-akhir ini.

Solusi dari upaya ini adalah penggantian sejengkal jalan bersejarah, yaitu Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari. Jalan ini tidak hanya punya catatan sejarah panjang bagi warga kota Surabaya, bahkan Pemerintah Kolonial Belanda-pun sejak ratusan tahun lalu tidak pernah mengganti nama Jalan tersebut.

[54]https://tirto.id/pergantian-nama-jalan-661-tahun-setelah-perang-bubat-cKnd diakses 17 Oktober 2018 jam 01:27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejarahan inilah yang akan dipertahankan oleh sebagian warga, komunitas pelestari sejarah dan beberapa pakar berbagai bidang. Upaya pe-mutilasi-an sejarah inilah yang ditentang. Ide/gagasan rekonsiliasi Budaya yang agung itu diselesaikan dengan cara yang tidak berbudaya, yaitu memenggal kesejarahan masa lalu, dengan keputusan yang tidak kontekstual.

Surabaya berkembang pesat, termasuk kawasan-kawasan baru yang belum punya identitas, Di kawasan-kawasan baru ini sangat terbuka kemungkinan melegitimasi upaya rekonsiliasi Budaya tanpa merugikan banyak pihak. Termasuk pelenyapan sebagian goresan sejarah lama Surabaya (di Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari).[55]

[55]https://www.change.org/p/mutilasi-sejarah-tolak-perubahan-nama-jalan-dinoyo-gunungsari diakses 17 Oktober 2018 jam 00:48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Perubahan Nama Jalan Potret Tidak Bekerjanya Teori Politik Gabriel Almond

Dalam Teori Sistem menurut Gabriel Almond kebijakan publik dipandang sebagai hasil akhir dari proses politik dan Black Box (Legislatif) berperan sebagai aktor utama perumus kebijakan publik. Dalam teori sistem sebuah hasil akhir dari sebuah proses politik dimulai dari *input* yang berupa aspirasi, usulan dan persoalan yang ada di ranah akar rumput atau masyarakat. Lalu kemudian aspirasi ini masuk ke dalam kotak hitam *(Black Box)*, dalam hal ini badan legislatif di sebuah negara. Kemudian terjadi sebuah proses pembahasan di dalamnya, yang kemudian hasil akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Input ⟶ **Black Box** ⟶ **Output**

Jika sebuah Negara menggunakan Teori Sistem Gabriel Almond sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Maka ada syarat utama yang harus dipenuhi guna terlahirnya sebuah kebijakan yang dapat sesuai harapan, yaitu baiknya kemampuan Legislasi dari Black Box atau Badan Legislatif sebuah Negara. Gabriel Almond adalah seorang positivistik yang menganggap aktor politik bisa bebas nilai dan bebas dari kepentingan, padahal jika melihat apa yang terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia kenyataannya tidak demikian karena aktor politik kita tidak bebas dari kepentingannya masing-masing.

Maka jika sebuah Negara menggunakan teori sistem Gabriel Almond dalam proses perumusan kebijakannya, maka aktor politik yang punya peran besar dalam perumusan kebijakan publik tersebut haruslah orang yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan selanjutnya dari mana sebuah negara bisa mempunyai aktor politik yang duduk di Badan Legislatif yang mempunyai kecakapan dalam menjalankan tugasnya. Jawabannya adalah dari sebuah proses kompetisi demokrasi (pemilu) yang demokratis. Dan syarat utama berjalannya sebuah pemilu yang demokratis adalah ketika masyarakatnya mempunyai kedewasaan dalam berpolitik.

Rencana pergantian nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari Surabaya yang diusulkan oleh Pemprov Jawa Timur untuk harmonisasi budaya antara budaya Jawa Timur dan budaya Jawa Barat bakal sulit terealisasi. Pasalnya, kebijakan tersebut mendapat banyak penolakan oleh seluruh masyarakat dinoyo dan gunungsari. Dimana kebijakan tersebut akan berdampak pada pergantian akte kelahiran, ktp, stnk dan dokumen-dokumen penting lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat menolak kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Jawa Timur.

Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Johan Silas menilai perubahan dua nama Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda dan Jalan Gunungsari menjadi Jalan Siliwangi, bisa mencederai sejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak setuju karena perubahan nama jalan ini akan berdampak pada sejarah jalan itu," kata Johan Silas saat diundang Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan untuk rapat dengar pendapat di ruang Komdis D DPRS Surabaya.

Menurut dia, perubahan nama jalan secara total atau hanya sebagian saja tetap mencederai sejarah pada saat dua nama jalan tersebut ada sejak dahulu. Sebab, faktor historis tidak akan mengenal sebagian atau bahkan seluruhnya.

"Kalau memang rekonsiliasi budaya, harusnya yang terkait langsung itu di Mojokerto bukan di Surabaya waktu Perang Bubat. Belanda saja dari dulu tidak berani mengubah nama jalan itu," ujarnya.[56]

Ada juga pemerhati sejarah yang menolak kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut nantinya akan menghapus sejarah yang ada di nama dinoyo dan gunungsari itu sendiri. Sebagaimana penuturan Sandy selaku ketua komunitas Love Surabaya, sebuah komunitas yang bergerak dibidang eksplorasi sejarah kota Surabaya. Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo adalah dua jalan yang mempunyai nilai historical yang sangat tinggi bagi Kota Surabaya. Sebagai contoh Dinoyo sampai Keputran sejak tahun 1920an sudah diplot sebagai tempat-tempat bersejarah di Surabaya. Karena di Jalan Dinoyo adalah kampung keraton Surabaya, di masa lalu Surabaya masuk dalam Kadipaten Surabaya di bawah pemerintahan Kesultanan Mataram Islam. Dan jalan dinoyo di masa lalu adalah kampung keratonnya Surabaya. Di sana juga terdapat makam Mbah Joyo Prawito yang diyakini masyarakat setempat sebagai sesepuh Dinoyo sejak zaman Belanda.[57]

---

[56]https://jatim.antaranews.com/berita/260151/pakar-perubahan-dua-nama-jalan-surabaya-cederai-sejarah diakses 10 Februari 2019

[57]Wawancara dengan Sandy selaku ketua Komunitas Love Surabaya sebuah komunitas yang bergerak di bidang eksplorasi sejarah kota Surabaya. Tanggal 16 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai historis yang tak kalah besar juga terdapat di Jalan Gunungsari. Di jalan Gunungsari terdapat makam Mbah Geler selaku orang Belanda yang menjadi sesepuh di Gunungsari, makam beliau terdapat di bukit golf. Bukit golf di masa lalu juga tidak kalah tinggi nilai historisnya. Ketika pasukan Inggris mendarat di Surabaya, mereka mendarat di Morokrembangan dan terus merangsek sampai Tugu Pahlawan. Tetapi pasukan Inggris dalam menguasai Surabaya terhenti di jalan Gunungsari, tepatnya di bukit Golf sebagai pertahanan terakhir arek-arek Surabaya dalam menghadapi serangan pasukan Inggris. Dengan nilai historis yang sedemikian besar komunitas Love Surabaya selaku pemerhati sejarah kota Surabaya, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemprov Jawa Timur ini. Seyogyanya dalam pandangan komunitas Love Surabaya sebaiknya jalan lain saja yang namanya dirubah untuk rekonsiliasi antara suku Jawa dan suku Sunda yang digagas Pemprov Jatim dan Pemprov Jabar.[58]

Ketua Pansus perubahan nama jalan ini mengecam akan menolak perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari jika pemerintah provinsi dan kota belum memberikan jaminan kemudahan atas perubahan alamat dalam administrasi kependudukan warga setempat.

"Saya sebagai ketua pansus, berpandangan bahwa sepanjang pemerintahan belum bisa memberikan jaminan kemudahan atas perubahan alamat di kartu keluarga, kartu tanpa penduduk dan lainnya, maka perubahan nama jalan tidak perlu ada," kata Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan DPRD Kota Surabaya Fatkhul Muid.

[58]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan nama jalan tersebut berdampak pada 250 kepala keluarga secara langsung yang kaitannya dengan administrasi kependudukan dan serifikat tanah kepemilikan yang dimiliki warga.[59]

Oleh sebab itu anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem Fatchul Muid mundur dari posisinya sebagai Ketua Panitia Khusus Perubahan Nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo karena banyaknya tekanan dari internal pansus maupun eksternal.

"Mereka beragumentasi perubahan jalan untuk NKRI. Selalu bilang seperti itu, sementara banyak masyarakat yang menolak perubahan nama jalan tersebut," ujar Fatchul Muid.

Alasan Fatchul Muid mundur dari ketua pansus karena salah satunya dari mayoritas anggota pansus yang meminta agar pansus perubahan nama jalan disahkan sebelum 17 Agustus karena akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

"Sementara di sisi lain, penolakan dari masyarakat terus mengalir. Pada saat itu, saya menyarankan kepada anggota pansus agar tidak terburu-buru karena waktu pembahasan pansus sampai awal September. Tapi mereka menolak," ujarnya.[60]

Dengan fakta sejarah yang sedemikian besar di jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo, dapat dikatakan teori sistem Gabriel Almond tidak dapat bekerja sebagaimana idealnya. Dalam Teori Sistem menurut Gabriel Almond kebijakan publik dipandang sebagai hasil akhir dari proses politik dan Black Box (Eksekutif & Legislatif) berperan sebagai aktor utama perumus kebijakan publik. Dalam teori sistem sebuah hasil akhir dari sebuah proses politik dimulai dari *input* yang berupa

[59]https://jatim.antaranews.com/berita/258833/dprd-surabaya-ancam-tolak-parubahan-nama-jalan-gunungsari-dan-dinoyo diakses 11 Februari 2019

[60]https://jatim.antaranews.com/berita/260808/banyak-tekanan-fatchul-muid-mundur-dari-ketua-pansus-perubahan-nama-jalan-surabaya diakses 11 februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspirasi, usulan dan persoalan yang ada di ranah akar rumput atau masyarakat. Lalu kemudian aspirasi ini masuk ke dalam kotak hitam *(Black Box)*, dalam hal ini badan legislatif di sebuah negara. Kemudian terjadi sebuah proses pembahasan di dalamnya, yang kemudian hasil akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Dalam kasus perubahan nama jalan yang digagas pemprov Jatim, terlihat jelas bahwa pemprov Jatim selaku *Black Box* dalam teorinya Gabriel Almond tidak bisa bekerja sebagaimana kebutuhan publik. Pemprov selaku *Black Box*atau pengkaji kebijakan, tidak mengkaji kebijakan yang akan dibuatnya sebagaimana. Upaya rekonsiliasi yang digagas pemprov Jatim bersama pemprov Jabar dengan cara merubah nama jalan patut diapresiasi, tetapi pemprov Jatim seyogyanya patut mengkaji kembali nama jalan yang akan digantinya. Karena jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari adalah jalan yang punya nilai historis besar bagi kota Surabaya.

B. Kebijakan Perubahan Nama Jalan Minimnya Komunikasi Politik Pemprov Jatim

Menurut Dahlan sebagaimana dikutip oleh Hafied Cangara ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perikalu dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.[61]

Dalam buku *Introduction to Political Communication* oleh McNair dinyatakan bahwa murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan

[61]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda.[62]

Dalam konteks kebijakan pemprov tentang perubahan nama jalan, persoalannya selain tentang nilai sejarah yang teramat tinggi di jalan Gunungsari dan jalan Dinoyo. Dampak dari kebijakan ini selanjutnya adalah persoalan administrasi warga yang tinggal di jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari Surabaya. Pergantian nama jalan berarti pergantian identitas administrasi warga terdampak pergantian nama jalan seperti KTP, KK, dan akte kelahiran. Salah satu warga sekitar yang penulis temui dengan terang-terangan menolak kebijakan pemprov jatim dalam pergantian nama jalan ini. Salah satu hal yang dikhawatirkan tentu adalah persoalan administrasi pasca kebijakan itu lahir. Ditambah lagi beliau mengaku tidak ada sama sekali sosialisasi dari pemprov tentang kebijakan ini, dalam konteks ini ada yang salah dalam komunikasi politik pemprov dalam mensukseskan kebijakan ini.

"Persoalan selanjutnya mas jika perubahan nama jalan ini jadi apa pemprov maupun pemkot mau mengurusi administrasi kita. Kalau pun itu gratis apa itu benar terwujud nantinya. Saya sama sekali tidak yakinbisa gratis nantinya."[63]

Ditambah lagi mas gak ada sosialisasi sama sekali dari pemprov maupun pemkot tentang perubahan nama jalan ini. *Karuan gawe opo pemprov ganti jalan pemprov kurang penggawean* (Buat apa sebenarnya pemprov ganti jalan pemprov kurang pekerjaan saja).[64]

---

[62]Ibid., hlm. 30.

[63]Wawancara dengan Sunarto salah satu warga Dinoyo tanggal 5 Januari 2019

[64]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua RT 5 RW 8 Gunungsari Bapak Supriyadi mengatakan, "Saya Bersama warga terdampak akan tetap teguh untuk menolak adanya pengubahan nama jalan. Saya sampai mati pun akan menolak".

"Bahkan, meski Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjamin berbagai kemudahan pengubahan administrasi, namun pihaknya tidak percaya. Kami tidak yakin bahwa berbagai kemudahan itu akan benar-benar ada. Kami tidak ingin dibohongi," katanya.[65]

Kemudian Ketua Karang Taruna Gunung Sari yang menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan perubahan nama jalan ini. Persoalan utamanya tentu administrasi warga terdampak setelahnya. Saya jujur tidak setuju dengan kebijakan ini karena tentu akan melahirkan persoalan administrasi bagi warga terdampak. Jika dinyatakan pemkot maupun pemprov akan memudahkan dan menggratiskan warganya, apa itu akan terealisasi sebagaimana yang direncanakan.[66]

Dari data seperti ini terlihat jelas bahwa pemprov Jatim selaku pembuat kebijakan tidak dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi politik sebagaimana mustinya kepada public. komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan pada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup

[65]https://jatim.antaranews.com/berita/260151/pakar-perubahan-dua-nama-jalan-surabaya-cederai-sejarah diakses 10 Februari 2019

[66]Wawancara dengan Imam selaku Ketua Karang Taruna Gunungsari Surabaya Tgl 7 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.[67]

Dalam kasus perubahan nama jalan ini pemprov Jatim terlihat jelas gagal dalam menjalin komunikasi politik dengan warganya. Pemprov tidak melakukan sosialisasi yang baik dalam melancarkan kebijakan yang disusunnya.

[67]Ibid., hlm. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai data yang penulis dapatkan, dari penelitian yang penulis lakukan yakni :

1. Sehubungan kebijakan perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunugsari ini didasari oleh rekonsiliasi budaya antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari elite politik sendiri masih terjadi pro dan kontra tentang kebijakan perubahan nama jalan ini. Pasalnya, Ketua Pansus perubahan nama jalan Fathkul Muid mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Karena desakan dari Pemprov Jatim untuk mengganti nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari menjadi Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi.
2. Adapun respon masyarakat menunjukkan penolakan terhadap kebijakan perubahan nama jalan selain berdampak pada pengurusan awal catatan sipil, di samping itu juga penghapusan terhadap nilai-nilai sejarah yang diyakini masyarakat.

B. Saran

Kebijakan perubahan nama jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari mutlak harus dikaji ulang. Jika semangatnya adalah rekonsiliasi antara suku Jawa dan suku Sunda pasca perang bubat, alangkah seyogyanya pemprov memilih jalan lain untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diganti Namanya. Bukan jalan Dinoyo maupun Gunungsari yang memang sudah mempunyai nilai sejarah yang amat tinggi bagi Surabaya. Ada juga pakar sejarah yang mengatakan seandainya nama jalan yang diganti itu bukan di daerah Surabaya melainkan yang cocok itu di daerah Mojokerto karena disana basis Kerajaan Majapahit. Selain itu komunikasi politik dan sosialisasi para pemangku kebijakan harus lebih diperbaiki agar kebijakan yang mereka rencanakan dapat berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks.

Bungin, Burhan. 2006.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.

Gobel, Erwin Zubair, Yosep P. Koton. 2012. *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

H. Chilcote, Ronald. 2016. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.

M. Hikmat, Mahi. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*. Bandung: Simbiosa Rekatama.

Muhibbudin, Muhammad. 2018. *Sejarah Kelam Jawa dan Sunda Cinta Perang dan Rekonsiliasi*. Yogyakarta: Araska.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori & Praktek Pemerintahan & Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono, 2015. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijkan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Medpress.

Ardian Ginting, Deni. 2009. *Sejarah Perubahan Nama Jalan di Kota Medan Tahun 1900-1970*. Medan. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Sumatera Utara

Raihana Lestari, Kartika. 2017.*Policy Argumentationdalam Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan (Studi Kasus pada Ruas Jalan Berkapasitas Tinggi di Kota Bandar Lampung).* Lampung. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://guruppkn.com/tahap-tahap-kebijakan-publik

https://jatim.antaranews.com/berita/258833/dprd-surabaya-ancam-tolak-parubahan-nama-jalan-gunungsari-dan-dinoyo diakses 11 Februari 2019

https://jatim.antaranews.com/berita/260151/pakar-perubahan-dua-nama-jalan-surabaya-cederai-sejarah diakses 10 Februari 2019

https://jatim.antaranews.com/berita/260808/banyak-tekanan-fatchul-muid-mundur-dari-ketua-pansus-perubahan-nama-jalan-surabaya diakses 11 februari 2019

https://jatim.antaranews.com/berita/261116/ratusan-warga-surabaya-tolak-perubahan-dua-nama-jalan-video diakses 2 Februari 2019

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/12/p8lll5330-ini-tiga-nama-jalan-jawa-di-bandung-sebagai-rekonsiliasi diakses 2 Februari 2019

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/12/p8lll5330-ini-tiga-nama-jalan-jawa-di-bandung-sebagai-rekonsiliasi diakses 2 Februari 2019

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3668400/nama-baru-6-jalan-di-yogya-ada-jalan-padjajaran-sampai-brawijaya diakses 2 Februari 2019

https://news.detik.com/jawatimur/3908373/nama-jalan-di-surabaya-diubah-warga-ngurus-dokumen-jangan-susah diakses 08 April 2018

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya di akses 28 Agustus 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bubatdiakses09 April 2018

http://www.lovesuroboyo.org/dinoyo-kampung-tua-bersejarah-di-surabaya/ diakses 28 Agustus 2018 jam 17:34

http://www.lovesuroboyo.org/gunung-sari-diduga-ada-sejak-zaman-majapahit/ diakses 11 Oktober 2018 jam 01:49

https://www.change.org/p/mutilasi-sejarah-tolak-perubahan-nama-jalan-dinoyo-gunungsari diakses 17 Oktober 2018 jam 00:48

https://tirto.id/pergantian-nama-jalan-661-tahun-setelah-perang-bubat-cKnd diakses 17 Oktober 2018 jam 01:20

Wawancara dengan Sandy selaku ketua Komunitas Love Surabaya sebuah komunitas yang bergerak di bidang eksplorasi sejarah kota Surabaya. Tanggal 16 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Sunarto salah satu warga Dinoyo tanggal 5 Januari 2019

Wawancara dengan Imam selaku Ketua Karang Taruna Gunungsari Surabaya Tgl 7 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id